

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

ABSTRAK : Peraturan Wali Kota Cirebon nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PEDOMAN STANDAR PELAYANAN

BAB III KETENTUAN PENUTUP

- Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dan ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara Pelayanan Publik.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juni 2022.

- Lampiran : -